

ABSTRAK

Salah satu kejahatan yang seringkali meresahkan dan menjerumuskan seluruh anggota masyarakat adalah kejahatan kesusilaan, bahkan tidak jarang anak yang menjadi korban. Efek dari kejahatan seksual yang timbul bukan saja pada korban, tetapi juga pada kehidupan sosial masyarakat dimana korban tinggal. Ditinjau dari perangkat yuridis, Indonesia sudah mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dari ancaman tindakan perbuatan cabul/pencabulan yaitu melalui KUHP dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 59, Pasal 59A, dan Pasal 69A yang mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu juga diatur dalam Pasal 82 yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari proses peradilan masih banyak kasus pencabulan anak yang mandheg. Namun untuk perlindungan hukum dalam bentuk rehabilitasi, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial bagi korban anak sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah provinsi Jateng yang menyediakan fasilitas tersebut secara gratis. Adapun putusan hakim terhadap anak korban tindak pidana pencabulan ada yang sudah mencerminkan perlindungan terhadap korban, namun ada pula putusan yang belum mencerminkan upaya perlindungan terhadap korban anak dengan menjatuhkan pidana yang ringan atau bahkan putusan bebas.

Kata kunci : perlindungan anak, korban, tindak pidana pencabulan

ABSTRACT

One crime that often unsettles and detracts all members of the community is a crime of decency, even infrequently a child becomes a victim. The effects of sexual crimes that arise not only on the victim, but also on the social life of the community where the victim lives. Judging from the juridical instruments, Indonesia has regulated the protection of children from the threat of obscene acts through the Criminal Code and Law Number 35 Year 2014 concerning Protection of Children as last amended in Act Number 17 of 2016.

This study aims to determine the regulation of legal protection for children as victims of sexual abuse in Act Number 35 of 2014 concerning Child Protection and to find out the implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection against the crime of sexual abuse of children. The approach method used is normative juridical, descriptive analytical research specifications, while the data analysis method used is qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the regulation on legal protection of children as victims of sexual abuse in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection is regulated in Article 59, Article 59A, and Article 69A which regulates the special protection of children granted by the government and local government. It is also regulated in Article 82 which regulates criminal sanctions against perpetrators of sexual abuse of children. The implementation of Law Number 15 Year 2014 concerning Protection of Children against the crime of sexual abuse of children is not optimal. This can be seen from the judicial process that there are still many cases of child molestation that are stalled. However, for legal protection in the form of rehabilitation, psychosocial assistance, provision of social assistance for child victims, it has been implemented well by the Central Java provincial government which provides these facilities free of charge. The judges' decisions on child victims of sexual abuse have reflected the protection of victims, but there are also decisions that do not yet reflect efforts to protect child victims by making light sentences or even free decisions.

Keywords: *child protection, victims, acts of sexual abuse*